

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Jawa, letaknya berada ditengah dua provinsi besar yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak dari Barat ke Timur ialah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau Karimun Jawa). Provinsi Jawa Tengah secara administratif terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Jawa Tengah memiliki rata-rata suhu udara berkisar antara 18°C sampai 28°C. Sedangkan, kelembaban udara rata-rata bervariasi yakni dari 73 persen sampai 94 persen (jatengprov.go.id, 2017).

Di tahun 2021, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah 36.742.501 jiwa terdiri dari 18.362.143 jiwa penduduk laki-laki dan 18.153.892 jiwa penduduk perempuan. Akan tetapi, kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah kini menurun yakni 36.516.035 jiwa/km² (jateng.bps.go.id, 2017).

Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perda Jawa Tengah No. 9 tahun 2016) yakni sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9 tahun 2016 diakses pada tanggal 12 Desember 2022

Dari struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di atas terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Dinas daerah, Sekretariat Daerah, dan Badan Daerah. Dinas Daerah merupakan salah satu perangkat daerah dibawah oleh kepala daerah yang memiliki tugas membantu pelaksanaan fungsi perangkat daerah di segala bidang.

Menurut Tabel 4.1 terkait dengan Perda Jawa Tengah No. 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 23 dinas daerah yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1 Dinas-Dinas di Daerah Provinsi Jawa Tengah

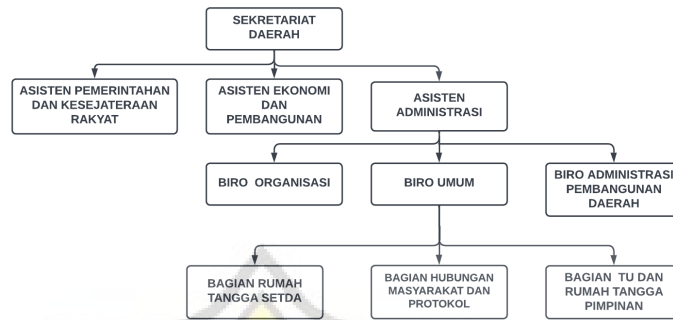
No	Nama Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
4.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.	SATPOL PP
7.	Dinas Sosial
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.	Dinas Ketahanan Pangan
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan
20.	Dinas Pertanian dan Perkebunan
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 2

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, ada juga badan daerah serta sekretariat daerah yang bertugas dalam membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Setda Jateng) memiliki visi dan misi serta susunan organisasi yang ada dalam Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 (Pergub No. 70 Tahun 2018) Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yakni: Visi : “ Menuju Jawa Tengah Berdikari Dan Semakin Sejahtera” Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi dan Misi : 1). Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran dan Guyub untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik, 2). Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, 3). Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran dengan Memperkuat Basis Ekonomi Rakyat dan Membuka Ruang Usaha Baru, 4). Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya dan Mencintai Lingkungan.

Saat ini, Setda Jateng memiliki acuan peraturan, yakni Pergub Jateng No. 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, berikut Struktur Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sesuai Pergub Jateng Nomor 70 Tahun 2018 pada gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4.2 Susunan Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Sumber: setda.jatengprov.go.id diakses pada tanggal 1 Desember 2022

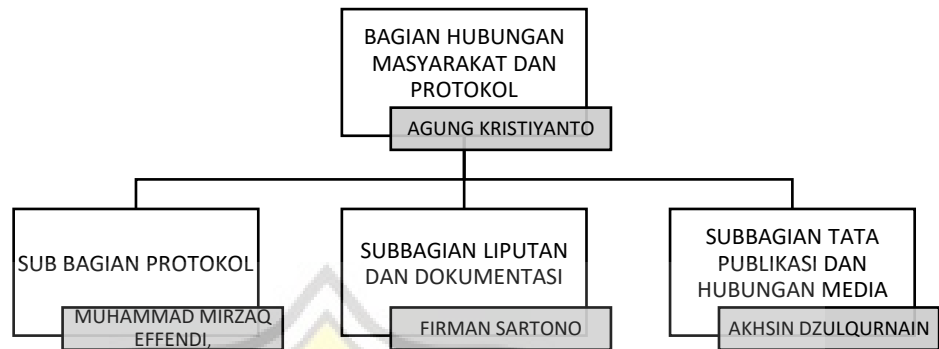
Berdasarkan struktur Setda Jateng di atas terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan,
3. Asisten Administrasi.

Asisten Administrasi memiliki Subbagian yang terdiri dari tiga bagian yakni sebagai berikut.

1. Biro organisasi,
2. Biro Umum,
3. Biro Administrasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Pergub Jateng No. 70 Tahun 2018 bahwa Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol memiliki Sub Bagian yang terdiri dari Sub Bagian Protokol, Sub Bagian Liputan dan Dokumentasi dan Sub Bagian Tata Publikasi dan Hubungan Media. Pada gambar 4.3 merupakan bagan struktur organisasi Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng yakni sebagai berikut:



Gambar 4.3 Susunan Struktur Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sumber : setda.jatengprov.go.id diakses pada tanggal 1 Desember 2022 Berdasarkan Pergub Jateng No. 70 Tahun 2018 terkait Struktur Bagian

Hubungan Masyarakat dan Protokol memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Tugas humas pada Subbagian Liputan dan Dokumentasi yakni sebagai berikut.
 1. menyiapkan bahan peliputan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 2. menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 3. menyiapkan bahan liputan lainnya untuk keperluan publikasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dan program pembangunan daerah;
 4. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang analisis media
 5. menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumen;
 6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Tugas humas pada Subbagian Publikasi dan Hubungan Media yakni sebagai berikut.

1. menyiapkan bahan pengolahan dan editing bahan publikasi
2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang publikasi
3. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan informasi hubungan media
4. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus kepada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol yang mempunyai tugas membantu Setda Jateng dalam menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk keperluan publikasi yang berguna untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Peneliti berfokus pada tugas Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media yakni menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan informasi hubungan media. Selain itu, Subbagian Tata publikasi dan Hubungan Media juga menjalankan tugas kehumasan terkait publikasi melalui akun @Humasjateng di berbagai kanal publikasi *online*, cetak dan media sosial maupun media luar ruang.

4.2 Hubungan Masyarakat

Hubungan Masyarakat (humas) pemerintahan memiliki beberapa tugas utama yang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Tentang Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintahan (Permenpan & RB No. 30 tahun 2011) :

1. Komunikasi timbal balik antara instansi dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah
4. Membangun citra dan reputasi positif

Akan tetapi, peneliti hanya berfokus pada tugas humas kedua yakni meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Upaya yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng melalui akun @Humasjateng di berbagai kanal publikasi *online*, cetak dan media sosial maupun media luar ruang.

Media *online* dan media cetak digunakan Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Setda Jateng untuk dapat mempermudah informasi dapat menyebar di masyarakat dan lebih mudah untuk diakses di mana saja sesuai dengan media apa yang diminati. Dan tentunya mempertahankan hubungan kerjasama antara Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Setda Jateng dengan media manapun. Khusus situs Humas Jateng dikelola langsung oleh Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media sendiri sehingga terkait segala

informasi terkait pimpinan maupun kegiatan dan layanan yang dilaksanakan selama ini terdapat di situs tersebut.

Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Setda Jateng berupaya untuk terus meningkatkan kinerja melalui kelancaran arus informasi melalui berbagai media sosial. Media sosial yang digunakan sudah mencakup keseluruhan yakni *Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube*. Sekarang juga telah merambah ke *Tiktok*, yang mana dalam tiap konten yang dimuat berisi tentang informasi terkait data, program, kebijakan, *statements* pimpinan, isu seputar Jawa Tengah dan selingan berupa hiburan. Semua konten tersebut dikemas dengan menarik agar mudah dipahami serta pesan yang disampaikan juga dapat ditangkap.

Isi Informasi yang dikemas oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng terkait kegiatan pimpinan (humasprovjateng.go.id, 19/10/2021). Berikut merupakan tabel 4.2 terdiri dari 35 isi informasi yang dikemas oleh Bagian Humas dan Protokol di situs humasprovjateng.go.id.

Tabel 4.2 Informasi terkait kegiatan pimpinan yang dikemas oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng

No.	Informasi	No.	Informasi
1.	Bantuan dari pemerintah untuk masyarakat	19.	Penanganan bencana
2.	Kerja sama	20.	Program Rumah “ <i>Tuku Lemah oleh Omah</i> ”
3.	Tinjau langsung korban bencana	21.	Pelatihan
4.	Peresmian	22.	Program RLTH
5.	Vaksinasi	23.	Musyawaharah

6.	Kolaborasi	24.	Koordinasi FKPPi
7.	Program <i>Stunting</i>	25.	Seminar
8.	Sosialisasi	26.	Deklarasi
9.	Pencegahan penyakit	27.	Kolaborasi Pemprov Jateng dan GAIKINDO
10.	Peningkatan layanan	28.	Forum dengan berbagai pihak untuk bersinergi
11.	Kampanye masker	29.	Kontribusi dengan berbagai pihak atasi persoalan Jawa tengah
12.	Media promosi parawisata	30.	Peningkatan Program mengcover kebutuhan pangan
13.	Kampanye produk lokal	31.	Monitoring dan supervisi
14.	Lapak Ganjar	32.	Penggunaan BPJS bantu petakan masyarakat
15.	UMKM internasional	33.	Silaturahmi
16.	Kunjungan	34.	Program " <i>aku sedulurmu</i> "
17.	Pameran	35.	Program " <i>Jo Kawin Bocah</i> "
18.	Festival		

Sumber: humasprovjateng.go.id (19/10/2021)

Kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng, yakni sebagai berikut.

a. Informasi tentang kebijakan kehumasan.

Informasi terkait kebijakan kehumasan lebih cenderung kearah yang menyampaikan informasi-informasi seputar kegiatan pimpinan, *statements*, konsep maupun evaluasi program untuk kedepannya.

Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Akhsin Zulqurnain (lamp. 2, hal a).

“Jadi kita menginformasikan Pak Gubernur ngapain saja, Pak Wagub ngapain saja, Pak Sekda ngapain saja. Kemudian mereka punya *statements* apa terhadap isu yang terjadi. khusus di Jawa Tengah memang kita hanya menyampaikan informasi-informasi yang disampaikan pimpinan ataupun konsep program dari pimpinan ke depan serta evaluasi informasi dari pimpinan”

b. Informasi tentang tugas kehumasan

Informasi terkait tugas kehumasan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng yakni seperti meliput berita, mewawancarai pimpinan dan masyarakat sekitar, memonitoring isu seputar Provinsi Jawa Tengah, dan mengemas informasi pimpinan menjadi informasi yang menarik serta menyampaikan *feedback* dari masyarakat kepada pimpinan. Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Akhsin Zulqurnain (lamp. 2, hal b)

“Meliput, mewawancarai Pak Gubernur, mempertegas pernyataan dengan konsep, mewawancarai masyarakat sekitar, memantau isu-isu yang beredar seputar Provinsi Jawa Tengah, mengemas informasi terkait isu, *statement* menjadi suatu informasi yang menarik dan mudah dipahami, menyampaikan *feedback* masyarakat pada pimpinan untuk ditindaklanjuti.”

c. Informasi tentang pelaksanaan pola komunikasi

Informasi terkait pelaksanaan pola komunikasi yang terjadi di dalam Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng yakni lebih fleksibel karena dalam berkoordinasi antar bagian bisa dilakukan secara langsung tanpa

melalui pimpinan sehingga lebih cenderung informal atau tidak resmi. Semua penjelasan tersebut menunjukkan penggunaan pola bintang atau semua saluran dalam internal Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng. Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Akhsin Zulqurnain (lamp.6, hal b)

“Kami melakukan koordinasi antar bagian secara langsung tanpa melalui pimpinan karena dengan cara seperti ini kita dapat bergerak dengan cepat dalam menyediakan informasi.”

d. Informasi tentang kegiatan kehumasan

Informasi terkait kegiatan kehumasan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng meliputi menganalisis media terkait isu yang akan ditindaklanjuti pimpinan, memnantau jadwal, dan menyampaikan segala bentuk informasi terkait pimpinan melalui berbagai macam media. Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Akhsin Zulqurnain (lamp. 2, hal. b)

“Memantau jadwal pimpinan, menganalisis media terkait isu apa saja yang viral dan ditindaklanjuti, menginformasikan kebijakan pimpinan maupun konsep program yang dikemas melalui konten medsos, media cetak dan *online*, serta media luar ruang.”

e. Informasi tentang pengelolaan informasi

Informasi terkait pengelolaan informasi yang dilaksanakan Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng yakni meliputi pengambilan data berupa foto maupun video yang akan dipilah atau di *filter* informasi mana yang perlu untuk segera ditindaklanjuti dan harus disampaikan ke

masyarakat. Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Akhsin Zulqurnain (lamp. 2, hal.c)

“Pengelolaan informasi melakukan pengambilan video, foto, tidak langsung kita *publish* melainkan kita kelola dulu yakni kita *edit* terlebih dahulu di bagian saya. Sehingga segala bentuk informasi yang didapatkan tidak semua di *publish* melainkan di *filter* terlebih dulu mana yang sekiranya perlu cepat untuk ditindaklanjuti dan mana yang perlu disampaikan segera kepada masyarakat maupun publik.”

f. Informasi tentang pelayanan informasi

Informasi terkait pelayanan informasi yang disediakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng yakni meliputi mempublikasikan informasi terkait pimpinan melalui semua kanal media, dan meningkatkan fitur yang dapat menunjang penyampaian informasi dengan mengembangkan tampilan yang menarik di berbagai media. Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Akhsin Zulqurnain (lamp. 2, hal. b)

“Upaya yang dilakukan seperti mempublikasikan informasi (*statements*, program maupun kebijakan) terkait pimpinan di situs, di medsos, di media *online*, media cetak. Dan menjaga hubungan dengan media luar, meningkatkan tampilan situs, medsos, dan mengikuti perkembangan media sosial (Tiktok, reels, dsb).”

Dari keseluruhan penjelasan di atas, dalam meningkatkan arus informasi di Setda Jateng khususnya Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol telah melaksanakan publikasi terkait informasi pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Setda) melalui situs, media sosial, media luar ruang, dan berbagai media *online* maupun media cetak.

Berikut merupakan tabel 4.3 terdiri dari 8 platform media yang digunakan Setda Jateng dalam mempublikasikan informasi terkait kegiatan, program, *statement* dan kebijakan pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, dan Setda).

Tabel 4.3 Media Publikasi Setda Jateng

Media Sosial

Contoh Publikasi terkait Covid-19

Rangkuman Postingan di media sosial Humas Jateng
Sumber: humas.jatengprov.go.id diakses pada (28/12/2022)

Media Online & Cetak

Contoh Publikasi terkait Covid-19

Rangkuman berita Media Online dan Cetak
Sumber: humas.jatengprov.go.id diakses pada (28/12/2022)



Instagram Humas Jateng
Sumber: <https://www.instagram.com/humas.jateng/> diakses pada (28/12/2022)



Situs Humas Jateng
Sumber: <https://humas.jatengprov.go.id/> diakses pada (28/12/2022)

Media Luar Ruang

Contoh Publikasi terkait Covid-19 di Balkon lantai 3 Kantor Gubernur Jateng dan file sharing ke OPD



Rangkuman Media Luar Ruang Humas Jateng
Sumber: humas.jatengprov.go.id diakses pada (28/12/2022)

Inovasi Pelayanan

Selama Pandemi di Sekretariat Daerah Prov Jateng



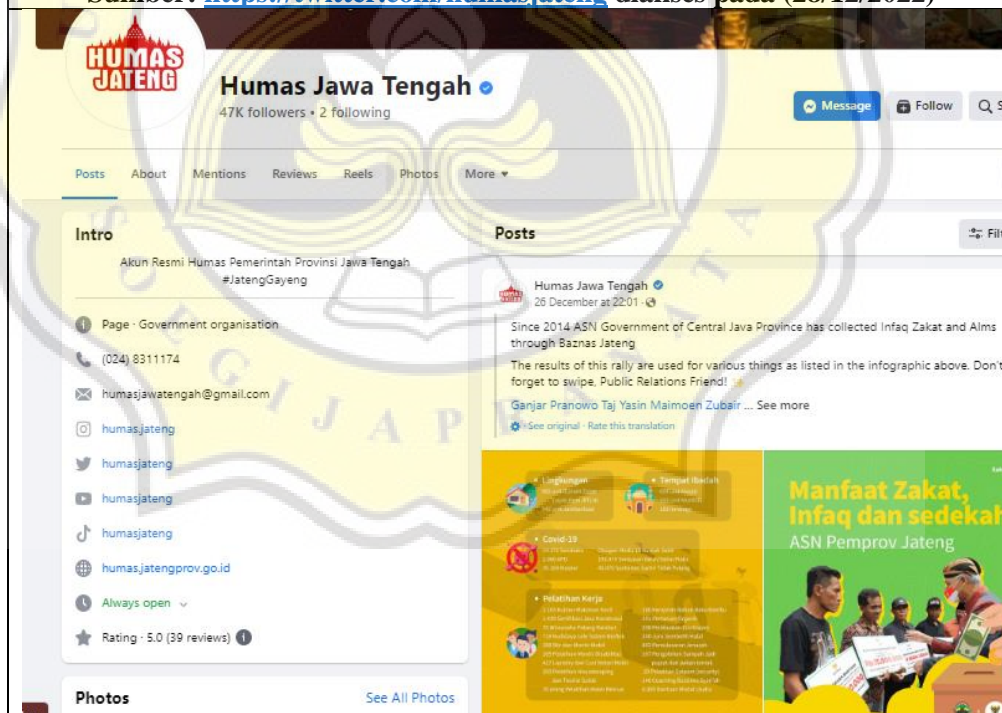
https://humas.jatengprov.go.id/gis_kegiatan

Inovasi Pelayanan Humas Jateng (Si Pelem Keprak)
Sumber: humas.jatengprov.go.id diakses pada (28/12/2022)



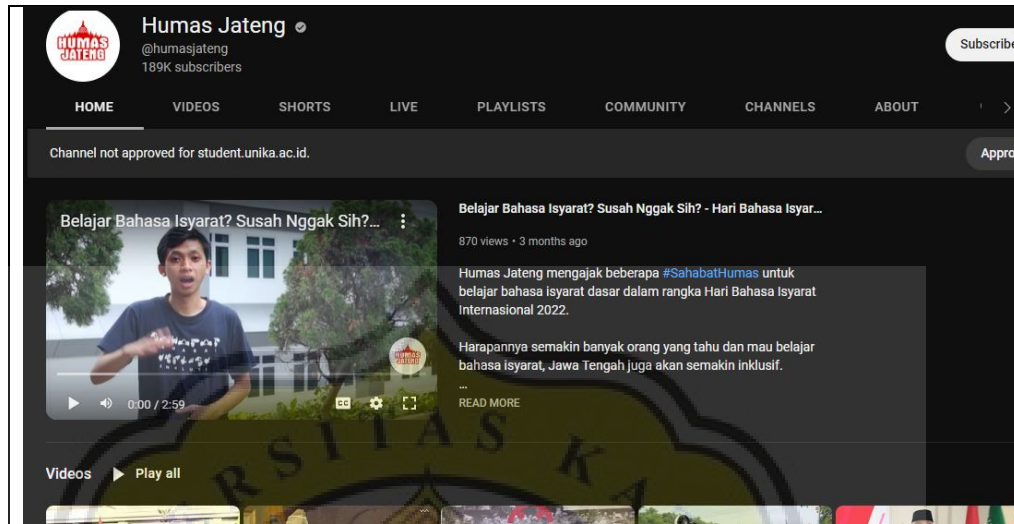
Twitter Humas Jateng

Sumber: <https://twitter.com/humasjateng> diakses pada (28/12/2022)



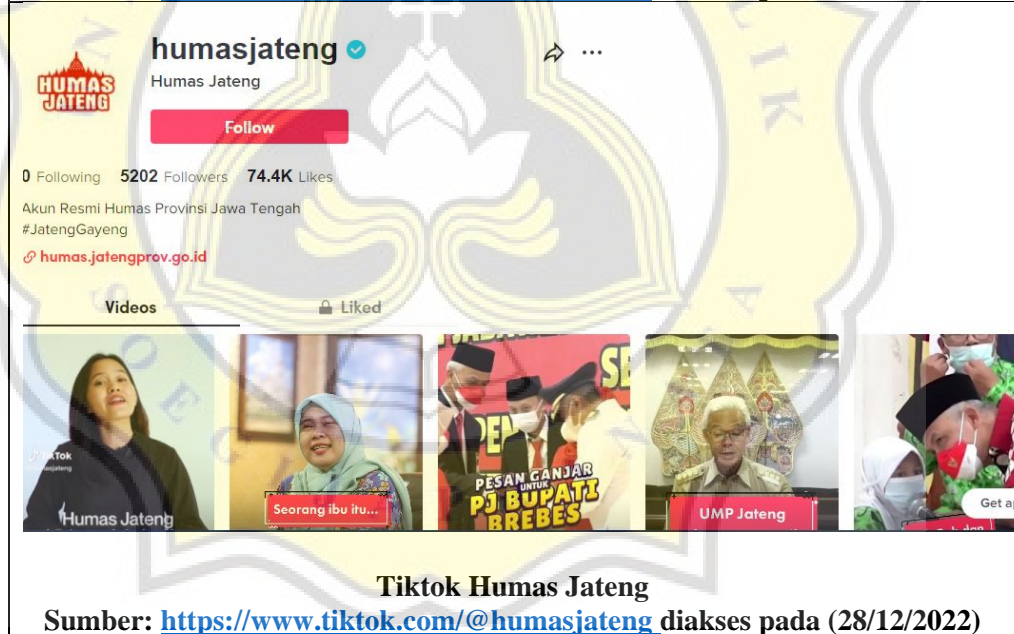
Facebook Humas Jateng

Sumber: <https://web.facebook.com/humasprovjateng> diakses pada (28/12/2022)



Youtube Humas Jateng

Sumber: <https://www.youtube.com/humasjateng> diakses pada (28/12/2022)



Tiktok Humas Jateng

Sumber: <https://www.tiktok.com/@humasjateng> diakses pada (28/12/2022)

Analisis, berdasarkan Tabel 4.3 terkait dengan meningkatkan aksesibilitas publik terlihat dari pemilihan berbagai *platform* yang digunakan, konteks dari informasi maupun berita yang dikemas sesuai dengan targetnya.

Platform media sosial Setda Jateng digunakan untuk menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan lebih cepat tanpa terbatas ruang dan waktu. Contohnya, pada media sosial seperti instagram digunakan untuk memberikan layanan informasi serta dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat, khususnya golongan usia produktif 18-34 tahun.

Sama halnya dengan Instagram, *facebook* juga digunakan untuk membangun relasi dengan banyak komunitas serta digunakan untuk menyalurkan informasi dengan luas serta lebih banyak digunakan oleh usia 35-44 tahun. Setda Jateng juga menggunakan twitter untuk membuka layanan keluhan maupun saran terkait program atau layanan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Sedangkan, situs dan youtube digunakan Setda Jateng untuk membagikan segala bentuk kegiatan dan program pimpinan secara lengkap. Tidak hanya itu, seiring dengan bertambahnya fitur maupun aplikasi lainnya Tiktok dan *reels* juga menjadi salah satu platform yang digunakan Setda Jateng dalam mempublikasikan terkait informasi pimpinan maupun hiburan dengan menarik serta lebih singkat. Kemudahan dalam mengaksesnya dimana saja dan melalui *smartphone* maupun bentuk gawai lainnya.

Setda Jateng juga bekerja sama dengan berbagai platform khususnya media *online* dan media cetak dalam mempublikasikan segala bentuk informasi terkait pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Setda). Media online memiliki peranan dalam penyampaian informasi yang cepat tanpa terbatas ruang dan

waktu. Akan tetapi, media cetak tentunya memiliki kelebihan dari sisi penyampaian informasi yang lebih kompleks serta lebih tepat sasaran. Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Akhsin Zulqurnain terkait dengan meningkatkan aksesibilitas publik (lamp. 2, hal. b).

“Setelah melalui tahap pengeditan lalu dikerjasamakan dengan media, seperti TVOne, Kompas, Detik, Tempo dan sebagainya.”

Media luar ruang seperti baliho, *banner*, dan spanduk pun berperan penting dalam menyampaikan informasi terkait pimpinan dengan pesan yang singkat serta mudah dipahami oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan Setda Jateng dalam meningkatkan penyampaian informasi terkait pimpinan tentunya memunculkan inovasi baru berupa sistem informasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan atau disebut “*Si Pelem Keprok*.” Informasi yang dimuat berupa peta dan agenda kegiatan pimpinan, laporan berita, survey kepuasan, dan laporan aksi perubahan.

Selain itu juga terdapat pelayanan khusus bagi kalangan disabilitas untuk dapat mendapatkan memudahkan mengakses informasi yang sama dengan mudah. Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Akhsin Zulqurnain terkait dengan meningkatkan aksesibilitas publik (lamp. 2, hal. d).

“Setda melakukan koordinasi dengan para penyandang tuli dan tunanetra, kita sesuai ketenagakerjaan, 1% harus ada disabilitas. Pada media sosial terdapat konten khusus belajar bahasa isyarat secara berkala. Konsep yang dibuat tidak

sekedar *output* tapi sampai bagaimana informasi itu tersampaikan. Konten yang dibuat pun bervariasi sehingga tidak terlalu monoton. Karena masyarakat kurang tertarik dengan konten yang serius. Oleh karena itu, konten dikemas dalam bentuk *motion grafis*, kartun, foto. Dengan adanya fitur tambahan berupa *voice over* dan *subtitle* juga lebih memudahkan kalangan disabilitas dalam memahami informasi yang disampaikan.”

Kesimpulan, berdasarkan data di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam meningkatkan arus informasi dan aksesibilitas publik Setda Jateng, khususnya Bagian Humas dan Protokol telah melaksanakan tugas kedua dari Permenpan & RB No.30 Tahun 2011. Jika dilihat dalam melengkapi tugas kedua humas pemerintah Bagian Humas dan Protokol melakukan publikasi melalui berbagai *platform* media untuk menyalurkan informasi terkait kegiatan pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur Setda) maupun rencana program serta kebijakan yang akan diterapkan di semua *platform* tersebut agar masyarakat maupun publik dapat mengakses lebih mudah dan memberikan *feedback* langsung pada humas untuk ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Pimpinan.

4.3 Pola Komunikasi Organisasi di Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan komunikasi organisasi dalam tingkat pemerintahan terdapat komunikasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Khususnya dalam melakukan koordinasi dalam tiap kegiatan seperti meliput, mewawancarai pimpinan dan masyarakat sekitar, mempublikasikan informasi (*statements*, program maupun kebijakan) terkait pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Setda) di situs, di medsos, di media *online*, media cetak maupun media luar, memantau isu, dan menyampaikan

feedback masyarakat pada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan konsep dari Nainggolan (2021) terdapat lima pola komunikasi organisasi antara lain sebagai berikut.

4.3.1 Penerapan Pola Komunikasi Roda Pada Bagian Humas dan

Protokol Setda Jateng

Pola komunikasi roda ini memiliki pemimpin yang posisinya terletak di tengah. Tiap anggota tidak dapat berkomunikasi langsung terhadap sesama anggota lain melainkan harus melewati pemimpin untuk dapat bertukar informasi.

Pelaksanaan pola komunikasi organisasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng tidak terdapat pola komunikasi roda. Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Setda Jateng Pak Akhsin Dzul Qurnain (lamp.6, hal a)

“Tidak ada posisi sentral karena semua bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa harus melapor.”

Pelaksanaan pola komunikasi organisasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng tidak terdapat pola komunikasi roda. Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Setda Jateng Pak Akhsin Dzul Qurnain (lamp.6, hal b)

“Kami melakukan koordinasi antar bagian secara langsung tanpa melalui pimpinan karena dengan cara seperti ini kita dapat bergerak dengan cepat dalam menyediakan informasi.”

Analisis, berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Humas dan Protokol terkait dengan pola komunikasi roda tidak terjadi di Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng. Karena semua informasi yang didapatkan langsung diterima oleh seluruh anggota secara langsung di kantor maupun secara tidak langsung melalui *whatsapp group*. Jika terdapat pertanyaan maupun saran dari anggota maupun pimpinan dapat berkoordinasi secara langsung tanpa melalui satu atau dua pihak lain.

Kesimpulan, berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng hanya menggunakan satu pola yakni pola bintang atau semua saluran. Sehingga bila terjadi masalah dapat langsung tertangani dengan cepat dan tepat karena baik staf maupun pimpinan dapat berkoordinasi secara langsung karena memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Apabila Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng menggunakan pola roda memerlukan waktu yang lama dalam penyampaian dan penerimaan informasi antar anggota di tiap bagian.

4.3.2 Penerapan Pola Komunikasi Lingkaran Pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng

Pola lingkaran memungkinkan setiap anggota dapat berkomunikasi dengan dua anggota pada sisinya. Pola komunikasi ini tidak memiliki pemimpin sehingga tiap anggota memiliki hak yang sama. Akan tetapi,

setiap anggota tidak dapat berkomunikasi langsung dengan semua anggota yang ada.

Pelaksanaan pola komunikasi organisasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng tidak terdapat pola komunikasi lingkaran. Seperti yang disampaikan Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng Mita Ditya dan Sari (lamp.8, hal b)

“Semua staf dapat bertukar informasi baik secara langsung maupun melalui whatsapp group karena dengan begitu bisa lebih cepat dalam berkoordinasi dalam menghasilkan informasi untuk pimpinan maupun publik.”

Analisis, berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Humas dan Protokol terkait dengan pola komunikasi lingkaran tidak terjadi di Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng. Karena semua informasi yang didapatkan langsung diterima oleh seluruh anggota secara langsung di kantor maupun secara tidak langsung melalui *whatsapp group*. Jika terdapat pertanyaan maupun saran dari anggota maupun pimpinan dapat berkoordinasi secara langsung tanpa melalui satu atau dua pihak lain.

Kesimpulan, berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng hanya menggunakan satu pola yakni pola bintang atau semua saluran. Sehingga bila terjadi masalah dapat langsung tertangani dengan cepat dan tepat karena baik staf maupun pimpinan dapat berkoordinasi secara langsung karena memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Apabila Bagian Humas dan Protokol menggunakan pola

lingkaran maka memerlukan waktu yang lama dalam penyampaian dan penerimaan informasi antar anggota di tiap bagian. Karena penyampaian atau pertukaran informasi hanya dapat dilakukan dengan dua anggota di sisinya. Sementara, Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng dituntut untuk cepat dan tanggap dalam menyelesaikan setiap tugas terkait dengan publikasi pimpinan.

4.3.3 Penerapan Pola Komunikasi Y Pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng

Pola komunikasi Y ini memiliki pimpinan atau atasan yang jelas. Setiap anggota dapat menyampaikan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Terdapat empat tingkatan dalam pola Y, yang mana terdapat satu posisi di tengah yang menunjukkan paling penting dalam menyalurkan atau menyampaikan ke pimpinan maupun bawahan.

Pelaksanaan pola komunikasi organisasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng tidak terdapat pola komunikasi Y. Seperti yang disampaikan Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng Mita Ditya dan Sari (lamp.8, hal b)

“Semua staf dapat bertukar informasi baik secara langsung maupun melalui whatsapp group karena dengan begitu bisa lebih cepat dalam berkoordinasi dalam menghasilkan informasi untuk pimpinan maupun publik.”

Analisis, berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Humas dan Protokol terkait dengan pola komunikasi Y tidak terjadi di Bagian

Humas dan Protokol Setda Jateng. Karena semua informasi yang didapatkan langsung diterima oleh seluruh anggota secara langsung di kantor maupun secara tidak langsung melalui *whatsapp group*. Jika terdapat pertanyaan maupun saran dari anggota maupun pimpinan dapat berkoordinasi secara langsung tanpa melalui satu atau dua pihak lain.

Kesimpulan, berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng hanya menggunakan satu pola yakni pola bintang atau semua saluran. Sehingga bila terjadi masalah dapat langsung tertangani dengan cepat dan tepat karena baik staf maupun pimpinan dapat berkoordinasi secara langsung karena memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Apabila Bagian Humas dan Protokol menggunakan pola Y maka memerlukan waktu yang lama dalam penyampaian dan penerimaan informasi antar anggota di tiap bagian. Karena penyampaian atau pertukaran pesan pada pola Y memiliki tingkatan. Sedangkan, semua posisi dalam Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng memiliki posisi yang penting dalam tiap tugasnya sehingga tidak ada yang menerima pesan atau informasi yang paling banyak. Karena semua memiliki tugas yang sama dalam menyelesaikan tiap tugas terkait dengan publikasi pimpinan.

4.3.4 Penerapan Pola Komunikasi Rantai Pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng

Pola komunikasi ini sama dengan pola lingkaran merupakan pola yang tidak memiliki pimpinan. Pola rantai memiliki perbedaan karena posisi sentral atau tengah memiliki posisi yang sangat penting, dibandingkan dengan anggota lainnya. Komunikasi ini digunakan dalam kepemimpinan yang ketat dalam penyampaian informasi.

Pelaksanaan pola komunikasi organisasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng tidak terdapat pola komunikasi rantai. Seperti yang disampaikan Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng Mita Ditya dan Sari (lamp.8, hal b)

“Semua staf dapat bertukar informasi baik secara langsung maupun melalui whatsapp group karena dengan begitu bisa lebih cepat dalam berkoordinasi dalam menghasilkan informasi untuk pimpinan maupun publik.”

Analisis, berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Humas dan Protokol terkait dengan pola komunikasi rantai tidak terjadi di Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng. Karena semua informasi yang didapatkan langsung diterima oleh seluruh anggota secara langsung di kantor maupun secara tidak langsung melalui *whatsapp group*. Jika terdapat pertanyaan maupun saran dari anggota maupun pimpinan dapat berkoordinasi secara langsung tanpa melalui satu atau dua pihak lain.

Kesimpulan, berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng

hanya menggunakan satu pola yakni pola bintang atau semua saluran. Sehingga bila terjadi masalah dapat langsung tertangani dengan cepat dan tepat karena baik staf maupun pimpinan dapat berkoordinasi secara langsung karena memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Apabila Bagian Humas dan Protokol menggunakan pola rantai maka memerlukan waktu yang lama dalam penyampaian dan penerimaan informasi antar anggota di tiap bagian. Karena penyampaian atau pertukaran pesan pada pola rantai memiliki posisi sentral. Sedangkan, semua posisi dalam Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng memiliki posisi yang penting dalam tiap tugasnya sehingga tidak ada yang menerima pesan atau informasi yang paling banyak. Karena semua memiliki tugas yang sama dalam menyelesaikan tiap tugas terkait dengan publikasi pimpinan.

4.3.5 Penerapan Pola Komunikasi Bintang atau Semua Saluran Pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng

Pola komunikasi bintang merupakan pola komunikasi yang mana setiap bagian dapat berkomunikasi secara langsung dengan bagian lainnya. Karena setiap bagian baik anggota maupun pimpinan memiliki kemampuan yang sama untuk mempengaruhi lainnya.

Pelaksanaan pola komunikasi organisasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng menggunakan pola komunikasi bintang atau semua

saluran. Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Setda Jateng Pak Akhsin Dzul Qurnain (lamp.6, hal b)

“Kami melakukan koordinasi antar bagian secara langsung tanpa melalui pimpinan karena dengan cara seperti ini kita dapat bergerak dengan cepat dalam menyediakan informasi.”

Pelaksanaan pola komunikasi organisasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng berdasarkan pendapat dari Staf Bagian Humas dan Protokol sendiri pun sama. Seperti yang disampaikan Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng Mita Ditya dan Sari (lamp.8, hal b)

“Semua staf dapat bertukar informasi baik secara langsung maupun melalui whatsapp group karena dengan begitu bisa lebih cepat dalam berkoordinasi dalam menghasilkan informasi untuk pimpinan maupun publik.”

Pelaksanaan pola komunikasi organisasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng berdasarkan pendapat dari Staf Bagian Humas dan Protokol sendiri pun sama. Seperti yang disampaikan Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng Mita Ditya dan Sari (lamp.8, hal a)

“Koordinasi berlangsung terbuka dari bawahan ke atasan semisal terdapat masalah dalam Bagian Humas dan Protokol maka akan di bahas secara bersama-sama di dalam rapat untuk mencari solusi serta kesepakatan bersama agar masalah cepat terlesaikan.”

Pelaksanaan pola komunikasi organisasi bintang atau semua saluran pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng. Seperti yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Publikasi dan Hubungan Media Setda Jateng Pak Akhsin Dzul Qurnain (lamp.6, hal b)

“Gaya kepemimpinan tiap pemerintahan itu berbeda-beda ada yang resmi dan tidak resmi. Seperti yang koordinasi yang kami lakukan disini

tidak resmi karena gaya pemimpin kami memang informal atau cenderung casual jadi lebih fleksibel dalam berkoordinasi antar bagiannya.”

Analisis, berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Humas dan Protokol terkait dengan pola komunikasi bintang atau semua saluran telah dilaksanakan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng. Karena semua informasi yang didapatkan langsung diterima oleh seluruh anggota secara langsung di kantor maupun secara tidak langsung melalui *whatsapp group*. Jika terdapat pertanyaan maupun saran dari anggota maupun pimpinan dapat berkoordinasi secara langsung tanpa melalui satu atau dua pihak lain.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng terdapat pola komunikasi bintang atau semua saluran. Karena semua informasi yang didapatkan langsung diterima oleh seluruh anggota secara langsung di kantor maupun secara tidak langsung melalui *whatsapp group*. Jika terdapat pertanyaan maupun saran dari anggota maupun pimpinan dapat berkoordinasi secara langsung tanpa melalui satu atau dua pihak lain. Sehingga bila terjadi masalah dapat langsung tertangani dengan cepat dan tepat karena baik staf maupun pimpinan dapat berkoordinasi secara langsung untuk mengadakan rapat dan setiap anggota memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya satu sama lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Permenpan & RB Nomor 13 Tahun 2019), perilaku kerja meliputi lima aspek yakni orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan (Permenpan & RB Nomor 13 Tahun 2019 BAB VII bagian 3 Pasal 45 ayat 1). Perilaku kerja seperti kepemimpinan dapat mempengaruhi hasil pelayanan yang dihasilkan dalam internal Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng khususnya dalam komitmen dalam tugas masing-masing antarbagian dalam menyediakan pelayanan terkait informasi pimpinan. Selain itu, kerja sama yang terjalin antar bagian dalam menerima maupun menyampaikan pesan antarbagian dalam pola komunikasi semua saluran ini. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan Gubernur Jateng mendorong terciptanya pola komunikasi semua saluran dalam internal Bagian Humas dan Protokol yakni dalam berkoordinasi menyediakan informasi terkait pimpinan pada publik.

Kesimpulan, berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng hanya menggunakan satu pola yakni pola bintang atau semua saluran dengan demikian penyampaian dan penerimaan informasi baik dari anggota pada pimpinan maupun sebaliknya berjalan dengan informal. Karena gaya pemimpin juga menentukan bagaimana suatu sistem yang ada di dalamnya

terjalin satu dengan lainnya. Semua posisi dalam Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng memiliki posisi yang penting dalam tiap tugasnya sehingga tidak ada yang menerima pesan atau informasi yang paling banyak. Karena semua memiliki tugas yang sama dalam menyelesaikan tiap tugas terkait dengan publikasi pimpinan. Dengan begitu pola komunikasi bintang atau semua saluran telah dilaksanakan dan diterapkan di Setda Jateng selama kepemimpinan Pak Gubernur Ganjar Pranowo.

